

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat terselesaikannya Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 – 2018 yang diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Rencana Strategis Perubahan ini memuat kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja. Rencana Strategis ini memuat Program Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2014 – 2018, isu-isu strategis, sasaran, strategi dan kebijakan. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Demikian semoga Rencana Strategis Perubahan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Tenaga Kerja. Dan atas perhatian semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga selesainya buku ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih, selain itu juga kami mengharapkan kritik dan saran bagi penyempurnaan dan perbaikan Rencana Strategis ini.

Bekasi,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA



H. MOCHAMAD KOSIM. SH. MH
NIP. 19590218 198603 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencakup:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Bekasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D)
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

a. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2013-2018 ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2017 dan 2018 dan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun tersebut.

Tujuan penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2013-2018 ini adalah agar perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dilakukan secara terukur sesuai dengan perumusan indikator yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas, sehingga target untuk setiap tahun pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dapat tercapai.

b. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2014-2018 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup: informasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Bekasi, sumberdaya yang dimiliki, capaian dan kinerja program yang telah dilaksanakan sebelumnya serta kendala-kendala dalam .

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis

- BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai komitmen yang akan dicapai dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk pencapaian visi misi Kota Bekasi tahun 2013-2018.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi serta Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah :
 1. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub bag Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bag Perencanaan
 - c. Sub bag Keuangan
 2. Bidang Pelatihan Kerja, membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan Pelatihan
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
 - c. Seksi Sertifikasi Kompetensi
 3. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas membawahkan:
 - a. Seksi Informasi Pasar Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan dan Konsultansi Produktivitas;
 - c. Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas.
 4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 5. Bidang Hubungan Industrial Dan Jamsostek Tenaga Kerja
 - a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial.

B. Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja untuk mencapai visi dan misi Dinas.

b. Fungsi Kepala Dinas

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang transmigrasi;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang transmigrasi serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;

- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

- 1). **Sub Bagian Perencanaan** mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup Dinas untuk mencapai tata perencanaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- 2). **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;

- e. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
 - g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- 3). **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD
 - d. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
 - e. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
 - f. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
 - g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2. Bidang Pelatihan Kerja

Bidang Pelatihan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan serta sertifikasi kompetensi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- d. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- h. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

1). **Seksi Kelembagaan Pelatihan** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kelembagaan pelatihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, analisis, penyusunan, pemantauan, evaluasi dalam pelaksanaan kelembagaan pelatihan yang meliputi lembaga pelatihan kerja swasta dan pelatihan kerja swasta;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2.) **Seksi Penyelenggaraan Pelatihan** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan penyelenggaraan pelatihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, analisis, penyusunan, pemantauan, evaluasi serta penyiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi instruktur, tenaga pelatihan, dan calon peserta pelatih kerja;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3). **Seksi Sertifikasi Kompetensi** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan sertifikasi kompetensi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, perumusan, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang meliputi peserta pelatihan dan tenaga kerja serta lembaga pelatihan kerja swasta/perusahaan;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktivitas

Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi informasi pasar kerja, pelatihan dan konsultasi produktivitas serta pengukuran dan analisa produktivitas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pengoordinasian pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah Kota Bekasi;
- d. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan;
- e. pengoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan;
- f. pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat Kota;
- g. pengoordinasian pemantauan surveillance;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

- 1). **Seksi Informasi Pasar Kerja** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan informasi pasar kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pendataan, pelayanan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan informasi pasar kerja yang

meliputi pencari kerja, pemberi kerja, serta lowongan kerja dan penempatan kerja;

- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2). **Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pelatihan dan konsultasi produktivitas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, peningkatan, pengukuran dan pemantauan dalam pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas yang meliputi promosi, sumber daya manusia, alat, teknik dan metode;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3). **Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengukuran dan analisa produktivitas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengukuran, peningkatan dan pemantauan dalam pelaksanaan pengukuran dan analisa produktivitas yang meliputi sumber daya manusia, data dan metode serta pemasaran;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja luar negeri serta pengembangan dan perluasan kesempatan kerja untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- e. pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
- f. pelaksanaan verifikasi perbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta
- g. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- h. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tki
- i. pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri
- j. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja
- k. pengoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan
- l. pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI
- m. pemberdayaan TKI purna
- n. penerbitan perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing(IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota.
- o. pengoordinasian *recruitment* dan penempatan transmigran, pembekalan calon transmigran, monitoring, evaluasi dan merumuskan bahan konsep kerjasama transmigrasi;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- r. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

1). Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan informasi pasar kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pendataan, pelayanan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan informasi pasar kerja yang meliputi pencari kerja, pemberi kerja, serta lowongan kerja dan penempatan kerja;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2). Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pelatihan dan konsultasi produktivitas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, peningkatan, pengukuran dan pemantauan dalam pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas yang meliputi promosi, sumber daya manusia, alat, teknik dan metode;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3). Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengukuran dan analisa produktivitas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengukuran, peningkatan dan pemantauan dalam pelaksanaan pengukuran dan analisa produktivitas yang meliputi sumber daya manusia, data dan metode serta pemasaran;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan insdustrial untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- d. melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota;
- e. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- f. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
- h. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

- 1). **Seksi Persyaratan Kerja** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan persyaratan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Persyaratan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan penyusunan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan persyaratan kerja yang meliputi perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) dan lembaga kerjasama Tripartit;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

- 2). **Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan dan penyusunan dalam pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- 3). **Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kerja sama dan informasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi hubungan industrial, kelembagaan bipartit, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Tabel 2.2.1 Profil Sumberdaya Manusia

No	Unit Kerja	PNS	TKK	Jumlah
1	Sekretariat	14	10	24
2	Bidang Pelatihan Kerja	9	4	13
3	Bidang Pengembangan pelatihan dan Peningkatan Produktivitas	12	5	17
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	10	5	15
5.	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	14	4	18
	JUMLAH	59	28	87

Tabel 2.2.2 Struktur Golongan Pegawai

No	Unit Kerja	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Sekretariat	-	5	5	4
2	Bidang Pelatihan Kerja	-	-	7	2
3	Bidang Pengembangan pelatihan dan Peningkatan Produktivitas	-	-	9	3
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	8	2
5	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	-	8	6
Jumlah		-	5	37	17

Tabel 2.2.3 Struktur Pendidikan Pegawai

No	Unit Kerja	PNS	S3	S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD
1	Sekretariat	14	-	5	1	2	6	-	-
2	Bidang Pelatihan Kerja	9	-	4	2	1	2	-	-
3	Bidang Pengembangan pelatihan dan Peningkatan Produktivitas	12	-	6	2	1	3	-	-
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	10	-	1	7	-	2	-	-
5.	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	14	-	4	7	1	2	-	-
Jumlah		59	-	20	19	5	15	-	-

Aset yang dikuasai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk sampai tahun 2016 sejumlah unit atau senilai Rp..... Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi belum terpenuhi secara maksimal.

Kelengkapan saran prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.4
Asset / Modal Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2013 s.d 2018

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4 / Mobil	12	11	1		
2.	Kendaraan Roda 2 / Motor	17	9	2	6	
3.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3	3			
4.	Lemari Besi	4	4			
5.	Rak Besi/Metal	1	1			

6.	Rak Kayu	1	1			
7.	Filling Besi/Metal	25	25			
8.	Alat Penghancur Kertas	2	2			
9.	Overhead Proyektor/Infocus	1	1			
10.	Lemari Kayu	1	1			
11.	Meja Rapat	2	2			
12.	Meja Obat	-	-			
13.	Kursi Rapat	6	6			
14.	Kursi Tangan	-	-			
15.	Kursi Lipat	-	-			
16.	Meja Komputer	-	-			
17.	Meja Biro	15	15			
18.	Sofa	5	5			
19.	Moubiler Lainnya	-	-			
20.	AC	25	25			
21.	Sound System	1	1			
22.	Tustel/Camera	1	1			
23.	Lambang Garuda	1	1			
24.	Dispenser	-	-			
25.	Handy Cam	1	1			
26.	PC Unit	29	29	-	5	
27.	Lap Top / Note Book	9	9			
28.	Personal Komputer Lain-lain	8	8			
29.	Printer	13	13			
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1			
31.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3			
32.	Meja Kerja Pegawai Non Struktual	12	12			
33.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	6	6			
34.	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	1			
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1			
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3			
37.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktual	5	5			
38.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	5	5			
39.	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	6	6			
40.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	4			
41.	Buffet Kaca	6	6			
42.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	4	4			
43.	Pesawat Telephone	1	1			
44.	Facsimile	1	1			
45.	Wireless Amplifier	1	1			
46.	Bangunan Balai dan Rumah Pintar	-	-			

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

1. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, meliputi :
 - a. Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
 - c. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2. Pelayanan Pelatihan Kerja, meliputi :
 - a. Kelembagaan Pelatihan;
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan;
 - c. Sertifikasi Kompetensi.
3. Pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, meliputi :
 - a. Informasi Pasar Kerja;
 - b. Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas;
 - c. Pengukuran dan Analisa Produktivitas.
4. Pelayanan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi :
 - a. Persyaratan Kerja;
 - b. Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			86.13%	56.41	59.34	62.27	65.2	68.13	86.72	92.7	62.1	63.79	0.00	1.54	1.56	1.00	0.98	0.00
2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	70%		16.68%	5.16	8.09	11.02	13.9	16.88	8.75	2.02	7.87	11.66	14.07	1.70	0.25	0.71	0.84	0.83
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka			0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	13,93	12,11	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Keselamatan dan Perlindungan			100%	100	100	100	100	100	89,59	89,05	93,76	100	100	0,90	0,89	0,94	1,00	1,00
5.	Perselisihan Buruh dengan Pengusaha	50%		100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6.	Pengusaha Yang Menerapkan Kebijakan UMR Yang Telah Ditetapkan			100%	99,39	99,64	99,8	99,9	100	99	99,64	99,8	99,99	98,15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98
7.	Besaran Data Ketenagakerjaan		2 data	2	3	2	2	2	2	1	2								
8.	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	75%	2.750 orang	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	324	120				11.00	15.30			

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9.	Besaran Tenaga Kerja Ynag Mendapat Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	60%	1.120 orang	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	110	100				9.00	9.00			
10.	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat.	60%	220 orang	220	220	220	220	220	220	60	84				27.27	38.18			
11.	Pencari Kerja Berkartu Kuning/AK.I Yang Ditempatkan		3.778 orang	3.778	3.658	3.688	3.718	3.748	3.778										
12.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	340 prsh	340	340	340	340	340	340	499	365				146.76	107.35			
13.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	180 orang	180	90	90	180	180	180	1.540	922				1.711	1.024			
14.	Keselamatan dan Perlindungan		1.025 orang	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.025	1.200				91	106.6			
15.	Pembinaan Hubungan Industrial		335 orang	350	350	350	350	350	350	457	507				130.5	144.8			
16.	Besaran Peserta/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	50%	300 orang	300	100	150	200	250	300	320	156				320	104			
17.	Penyediaan Lapangan Kerja		50.000 lowongan		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	29.299	46.131				292.99	461.31			
18.	Angka Pengangguran Terbuka		8.2 %		10.00	10.1	8.4	8.3	8.2		9.36								
19.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan			50.000 orang	-	-	-	10.000	10.000	-	-		11.225						
20.	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian			20.450 orang	-	-	-	600	750	-	-		270						
21.	Prosentase Pengusaha Yang Melaksanakan UMK Yang Telah Ditetapkan			100%	-	-	-	95	100	-	-		95.74						
22.	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja			100%	-	-	-	100	100	-	-		100						
23.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Hak-hak Pekerja			47%	-	-	-	45	47	-	-		83						

Beberapa kinerja program Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2016 adalah :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Realisasi program :

Program Peningkatan Kesempatan Kerja yang Memiliki Indikator Kinerja Program Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan, yang mempunyai Target Kinerja 10.000 orang untuk Tahun 2016, memiliki capaian kinerja pada Tahun 2016 sebanyak 11.225. Target sampai dengan akhir tahun 2018 sudah tercapai pada akhir tahun 2016 yaitu sebanyak 65.225 orang. Apabila target 2017 dan 2018 diasumsikan tercapai maka akan terjadi kelebihan target. Akan tetapi untuk menurunkan angka pengangguran, target 10.000 orang tetapharus direalisasikan.

Tabel 2.3.2
Data Penempatan Tenaga Kerja Per Pendidikan
Tahun 2013 s.d Tahun 2016
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

NO	TAHUN	TIDAK LULUS	SD	SMP	SMU/SMA& MA	SMK	DI/ AKTA I	D2/ AKTA 2	D3/ AKTA 3	D4/ AKTA 4	SI	SII	SIII	JUMLAH
1	2013	-	3	107	4.690	11.376	-	6	782	3	744	-	-	17.711
2	2014	-	63	227	3.823	8.295	76	-	2.003	2	1.623	16	-	16.128
3	2015	3	21	24	1.590	12.699	-	74	1.752	21	3.974	33	-	20.191
4	2016	-	3	15	2.059	7262	-	3	901	10	965	7	-	11.225
JUMLAH		3	90	373	12.162	39.632	76	83	5.438	36	7.306	56	-	65.255

Sumber : Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Realisasi program :

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang Memiliki Indikator Kinerja Program Prosentase Pengusaha Yang Melaksanakan UMK Yang Telah Ditetapkan, yang mempunyai Target Kinerja 100% untuk Tahun 2016, memiliki capaian kinerja pada Tahun 2016 sebesar 95.74%. Target sudah tercapai, akan tetapi setiaptahunnya UMK selalu dirumuskan oleh Tim, sehingga anggarannya tetap harus dialokasikan. Indikator Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja yang mempunyai Target Kinerja 100% untuk Tahun 2016, memiliki capaian kinerja pada Tahun 2016 sebesar 100%, target tercapai. Indikator Meningkatnya Perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang mempunyai Target Kinerja 47% untuk Tahun 2016, memiliki capaian kinerja pada Tahun 2016 sebesar 87%, Realisasi sudah melebihi target, akan tetapi karena belum seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjaannya di Jamsostek, maka masih perlu dilakukan pembinaan kepada perusahaan, sehingga diharapkan kedepannya seluruh perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjaanya di Jamsostek.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Realisasi program :

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang memiliki Indikator Kinerja Program Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian, yang mempunyai target Kinerja 750 orang untuk Tahun 2016, memiliki capaian kinerja pada Tahun 2016 sebesar 270 orang, sedangkan capaian target sampai dengan 2016 sebanyak 1.163. Secara keseluruhan

masih terdapat sisa target sebesar 19.287 orang yang harus dipenuhi, sehingga target hingga akhir RPJMD dapat tercapai. Akan tetapi karena ada kesalahan dalam menentukan target, maka pada saat revisi target RPJMD target capaiannya dirubah. Sehingga untuk sisa target yaitu hanya untuk tahun 2018 sebanyak 750 orang atau pencari kerja yang memiliki keahlian sebagai salah satu cara mendapatkan pekerjaan ataupun dapat membuka angka pengangguran terbuka.

Tabel 2.3.3
Data Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian (Data Peserta Pelatihan)
Tahun 2013 s.d Tahun 2016
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

No	Jenis Pelatihan	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1.	Pelatihan Perbengkelan	44 orang	20 orang	20 orang		84
2.	Pelatihan Automotif	20 orang				20
3.	Pelatihan Servis AC	20 orang			20 orang	40
4.	Pelatihan Las CO2	20 orang	20 orang	40 orang	20 orang	100
5.	Pelatihan Las Listrik	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	80
6.	Pelatihan Operator Komputer	20 orang	20 orang	20 orang		60
7.	Pelatihan Stamping		20 orang			20
8.	Pelatihan Bubut		20 orang			20
9.	Pelatihan Tehnik Laundry		20 orang			20
10.	Pelatihan Menjahit		64 orang	40 orang	16 orang	120
11.	Pelatihan Menyetir Mobil				16 orang	16
12.	Pelatihan Bahasa Asing				16 orang	16
13.	Pelatihan Tata Rias		20 orang		16 orang	36
14.	Pelatihan Tata Boga		20 orang		16 orang	36
15.	Pelatihan Servise HP				20 orang	20
16.	Pelatihan Servis Elektronik				20 orang	20
17.	Pelatihan Pemagangan		90 orang	60 orang	50 orang	200
18.	Pelatihan Craine Hoist		20 orang			20
19.	Pelatihan Otomotif Sepeda Motor		20 orang			20
20.	Pelatihan Welding		20 orang			20
21.	Pelatihan Tata Laksana Rumah Tangga		20 orang			20
22.	Pelatihan Kelistrikan		20 orang			20
23.	Pelatihan Otomotif Mobil		20 orang			20
24.	Pelatihan Teknik Las		40 orang	20 orang	20 orang	80
25.	Pelatihan Operator Boiler		20 orang			20
26.	Pelatihan Sertifikasi Instruktur Pelatihan		15 orang			15
27.	Pelatihan Teknisi Komputer				20 orang	20
JUMLAH		144	529	220	270	1.163

Berdasarkan data tersebut dapat dihitung persentase dari beberapa Indikator Kinerja dengan rumus sebagai berikut :

1. Indikator Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
----- x 100 %
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar

2. Indikator Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian

Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih
----- x 100 %
Jumlah Pendaftar Pelatihan

3. Indikator Prosentase Pengusaha Yang Melaksanakan UMK Yang Telah Ditetapkan

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan UMK
----- x 100 %
Jumlah Perusahaan

4. Indikator Menurunnya Angka Sengketa Dengan Pengusaha

Jumlah Kasus Yang terselesaikan
----- x 100 %
Jumlah Kasus Yang Tercatat

5. Indikator Meningkatnya Perlindungan Terhadap Hak-hak Pekerja

Jumlah Perusahaan Peserta Jamsostek
----- x
100 %
Jumlah Perusahaan

2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA LANGSUNG URUSAN																	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2.275.000.000	2.325.000.000	2.375.000.000	2.550.000.000	2.850.000.000	1.394.083.500	1.955.684.000	1.355.372.577			61.27	84.11	57.06			0.15	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.300.000.000	2.150.000.000	2.414.590.000	2.656.049.000	3.054.456.350	1.976.344.500	1.756.435.000	1.655.256.989			85.92	81.69	68.55			0.15	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.554.000.000	2.086.600.000	2.450.000.000	2.695.000.000	3.099.250.000	2.504.450.000	1.955.684.000	1.598.643.800			98.05	93.72	65.25			0.16	
BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.598.838.000	2.019.263.500	2.898.107.000	3.332.823.050	3.767.539.100	1.419.064.607	1.608.432.717	1.738.519.810			88.75	79.65	59.98			0.08	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	375.000.000	421.000.000	563.640.000	648.186.000	732.732.000	378.597.814	320.427.919	370.886.166			10.095	76.11	65.80			0.10	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54.920.000	60.000.000	128.950.000	148.292.000	167.635.000	49.500.000	58.975.000	113.430.000			90.13	98.29	87.96			0.06	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	32.000.000	32.000.000	36.800.000	41.600.000	30.000.000	14.000.000	12.500.000			10.00	43.75	39.06			0.14	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	154.000.000	179.000.000	179.000.000	205.850.000	232.700.000	127.510.000	139.572.000	153.992.000			82.80	77.97	86.02			0.13	
Total	9.341.758.000	9.272.863.500	11.040.754.000	12.273.000.050	13.945.912.450	7.879.550.421	7.809.210.636	6.998.601.342									

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

A. Tantangan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sudah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Pencapaian target-target yang telah ditetapkan masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan yang ada di Kota Bekasi.

Tantangan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Bekasi;
2. Tingkat keterampilan kerja yang belum sesuai dengan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal.
3. Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) pada jabatan-jabatan strategis di Perusahaan;
4. Tingkat Kesejahteraan pekerja belum optimal.

B. Peluang

Terdapat beberapa peluang yang dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian target-target yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan. Diantara peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Angkatan Kerja yang meningkat;
2. Terbukanya lapangan kerja formal pada sektor jasa;
3. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi meningkat;
4. Meningkatnya kemandirian angkatan kerja dalam berusaha.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2005-2025, maka visi di dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kota Bekasi tahun 2005-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kota Bekasi tahun 2005-2025 bahwa visi jangka panjang Kota Bekasi adalah untuk menjadi “Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan” serta memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 selama masa kampanye, maka dengan ini dirumuskan **Visi** Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah: **“BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”**.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belumlah sempurna tanpa serangkaian misi yang berfungsi sebagai upaya dalam pewujudan visi tersebut. Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan Kota Bekasi pada akhir periode pembangunan lima tahun ke depan, Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018. Untuk itu dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi dan dengan memperhatikan langka-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018, berikut ini adalah **Misi** Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018:

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Berdasarkan pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan misi 1 dan 4 sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Misi 4 yaitu “Meningkatkan Perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi serta penciptaan iklim usaha yang kondusif ” memiliki keterkaitan secara eksplisit dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan misi tersebut diturunkan menjadi tujuan, yaitu: “Mewujudkan optimalisasi terbukanya lapangan kerja bagi Masyarakat”.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menuju Kota Bekasi Maju Sejahtera Dan Ikhsan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I..	Misi 1: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.	Masih kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan internal bidang dan kurangnya partisipasi menyeluruh yang dibangun oleh OPD	kemampuan aparatur yang tidak merata dan etos kerja serta mentalitas aparatur yang belum maksimal	- Tersedianya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas yang telah mendapatkan pendidikan teknis sesuai dengan bidang tugasnya - Tersedianya perangkat peraturan ketenagakerjaan mulai tingkat undang – undang sampai peraturan menteri
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnya kemampuan komunikasi aparatur dan pengetahuan teknologi baik lisan maupun tulisan dalam pelayanan masyarakat	- kemampuan aparatur yang tidak merata - kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja - kurangnya ketersediaan dana	- Peningkatan kemampuan aparatur dalam berkomunikasi dan kemampuan IT - Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai - peningkatan sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Kurangnya pengadaan kendaraan dinas operasional - Kurangnya Pengadaan perlengkapan gedung kantor - kurangnya pengadaan	- Tidak maksimalnya kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pada masyarakat - kurangnya ketersediaan dana	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional

		meubelair		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<p>- kurangnya peningkatan pengembangan fungsi koordinator dalam pengelolaan kepegawaian dalam tugas pokok dan fungsinya</p> <p>- kurangnya penunjang berbagai program prioritas terkait dengan kepegawaian</p> <p>- kurangnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal</p>	<p>- kemampuan aparatur pegawai yang tidak merata</p> <p>- tidak tersedianya secara kualitas sesuai dengan bidangnya</p>	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	Aparatur yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kerja	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Kurang terkoordinasinya dengan baik penyusunan laporan kinerja dan keuangan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan dari bidang – bidang terkait	Sulitnya berkoordinasi terkait data – data yang diperlukan dalam hal penyusunan laporan capain kinerja	Peningkatan koordinasi pada tiap bidang untuk penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian melalui pengembangan usaha			

	mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.			
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Informasi kesempatan kerja SKPD terhadap pencari kerja belum maksimal - Daya jangkau layanan SKPD dalam penempatan tenaga kerja belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Feedback dari Pencari Kerja terhadap Informasi SMS Gate Away belum maksimal - belum sinkronnya kebijakan pusat dalam bidang penempatan tenaga kerja antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - pertumbuhan ekonomi nasional terus membaik - pendidikan kompetensi calon tenaga kerja relatif membaik
2.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ‘- Sosialisasi, Fasilitasi dan pengawasan SKPD terhadap perusahaan / industri dalam keikutsertaan Jamsostek belum optimal ‘- Fenetrasi layanan Jamsostek kepada Tenaga Kerja masih lemah 	<ul style="list-style-type: none"> ‘- Kesadaran Pengusaha dalam keikutsertaan Jamsostek belum maksimal ‘- Penegakan Hukum terhadap Perusahaan / Industri yang tidak ikut Jamsostek belum Optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ‘- Landasan Hukum keikutsertaan Tenaga Kerja dalam Jamsostek (UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial) telah ditetapkan. ‘- Kesadaran Tenaga Kerja akan Hak – hak nya, termasuk keikutsertaan dalam Jamsostek makin meningkat
3.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ‘- Pusat pelatihan kerja (PPK) belum sepenuhnya mampu melayani peningkatan produktivitas yang berbasis kebutuhan pasar kerja - BLK dan UPT terkait belum berfungsi secara maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ‘- Ketersediaan instruktur dan sarana peningkatan produktivitas di Pusat Pelatihan Kerja (PPK) belum memadai - Sistem sertifikasi terhadap peserta yang telah di latih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ‘- Kerjasama SKPD (PPK) dengan industri dalam pelaksanaan peningkatan produktivitas makin berkembang - Kebutuhan industri dan tenaga kerja terlatih cukup besar

3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi

3.2.1 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah **“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**.

MAJU berarti :

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri
2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian.
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.
4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal.
5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

SEJAHTERA berarti :

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha.
2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat
3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.
4. Memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.

UNTUK SEMUA berarti:

1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat
2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat
3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia
4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambar tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Arah kebijakan pembangunan daerah di provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan 7 (tujuh) bidang unggulan sebagai penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bermutu (beyond the expectation), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.
3. Pengelolaan pertanian dan kelautan.
4. Energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumber daya air.
5. Industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif.
6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan yang berkelanjutan.
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

3.2.2 Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Presiden dan cabinet kerja telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat. Untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai tahun 2019, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan tujuh misi dan sembilan agenda pembangunan nasional masa pemerintahan lima tahun kedepan.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “ **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepridian Berlandaskan Gotong Royong** ”

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan memperkuat jati diri sebagai Negara hukum;
3. Mewujudkan politik Luar Negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup Manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkpribadian dalam berkebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu :

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh Warga Negara. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan salah satu hal yang perlu mendapatkan prioritas adalah Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran.
- b. Membangun Tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dalam agenda ini, peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan yang sangat penting.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung pengembangan pusat perniagaan yang berskala internasional dan nasional - Melanjutkan pengembangan industri besar, menengah, kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya jaringan kerjasama informasi ketenagakerjaan dengan berbagai pihak terkait - Belum optimalnya layanan pelatihan calon tenaga kerja - Belum adanya sistem informasi ketenagakerjaan yang kredibel baik di tingkat propinsi maupun kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum efektifnya pelaksanaan pemagangan calon tenaga kerja di industri/ dunia usaha - Belum optimalnya koordinasi antara SKPD dengan instansi termasuk asosiasi dunia 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tingginya mobilitas tenaga kerja dan pencari kerja. - Makin baiknya akses masyarakat terhadap informasi - Makin baiknya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat

			usaha, terkait perencanaan suply – demand tenaga kerja	
--	--	--	--------------------------------------------------------	--

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Wali Kota terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi dan nasional, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (2014)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pelayanan akses informasi bagi pencari kerja	70%	Renstra SKPD	Sistem informasi manajemen ketenagakerjaan	Infrastruktur sistem informasi berbasis TIK belum rata	Peningkatan efektifitas sistem informasi ketenagakerjaan
2. Pelayanan penempatan tenaga kerja	20%	SPM 50%	- Sistem informasi pasar kerja - Kerjasama antara SKPD dengan industri	Relevansi kopetensi calon tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha	‘- Penguatan kerja sama dunia usaha ‘- Peningkatan pengembangan sistem informasi tenaga kerja
3. Pelayanan pelatihan kerja	40%	SPM 60%	Daya dukung BLK dan lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan	Dukungan pihak swasta/ pihak ketiga	Perlu meningkatkan Kualitas pelayanan dan kapasitas di BLK
4. Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	90%	SPM 100%	Kapasitas SKPD dalam menyelesaikan perselesihan	Kebijakan pemerintah kota serta kepedulian dunia usaha	Kecepatan dan ketepatan SKPD dalam mencapai perselisihan
5. Pelaksanaan kepesertaan jamsostek	72%	Wajib lapor dengan kepesertaan jamsostek	Kapasitas sosialisasi jamsostek	Respon dunia usaha	Peningkatan kapasitas sosialisasi jamsostek
6. Fasilitasi bagi calon transmigrasi	100%	SPM 80%	Anggaran SKPD	‘- Budaya masyarakat kota bekasi ‘- Kebijakan	Peningkatan profesionalisme fasilitasi calon transmigrasi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (2014)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pemerintah kota bekasi	
7.Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	25%	SPM 80%	Kapasitas pengawasan ketenagakerjaan	'- Dukungan kementerian tenaga kerja '- Respon industri terhadap pengawasan ketenagakerjaan	Peningkatan kapasitas kepengawasan ketenagakerjaan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Secara garis besar isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Kurangnya kompetensi pencari kerja dengan kesempatan dan kualifikasi jabatan;
4. Meningkatnya kasus hubungan industrial;
5. Kurang optimalnya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Visi adalah cara pandang ke depan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut penetapan visi, merupakan bagian dari perencanaan strategis, dalam menentukan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 adalah **“Bekasi Maju , Sejahtera dan Ihsan”**. Dalam rangka mendukung Visi Kota Bekasi tersebut, maka Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah **“Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Terampil dan Mandiri Serta Terciptanya Ketenangan Dalam Bekerja dan Berusaha”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran-peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Berkualitas, Profesional dan Mandiri;
2. Mewujudkan optimalisasi terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat;
3. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan pekerjaan dan pemerintah;
4. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

4.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya saing”**

4.2.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran di Kota Bekasi” adalah:
 - a. Angka Pengangguran Terbuka yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
 - b. Penyediaan Lapangan Kerja yang dapat diukur melalui :
 - Data Jumlah Lowongan/kesempatan kerja baru yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja
2. Sasaran “Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja” adalah:
 - a. Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari terdaftar
 - b. Prosentase pencari kerja yang memiliki keahlian
 - Jumlah pencari kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan

3. Sasaran “Menciptakan Meningkatkan Kualitas Hubungan Tenaga Kerja Dengan Pengusaha” adalah:
 - a. Prosentase penurunan sengketa pengusaha dengan pekerja yang dapat diukur melalui:
 - Jumlah Kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang tercatat
 - b. Prosentase sengketa yang diselesaikan di tingkat mediasi yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah Kasus yang diselesaikan di tingkat mediasi dibagi jumlah kasusn tercatat
 - c. Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMK dibagi jumlah perusahaan
4. Sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja” adalah :
 - a. Indeks kepuasan masyarakat yang dapat diukur melalui :
 - Hasil Survey pelayanan public melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait pelayanan AK.I yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden, penerima layanan adalah para pencari kerja yang membuat kartu AK.I yang datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai responden dalam survey pelayanan publik.
 - b. Nilai Evaluasi AKIP yang dapat diukur melalui :
 - Hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30).
 - c. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah pengaduan yang disampaikan dibagi jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
5. Sasaran dari tujuan “Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik” adalah :
 - a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dapat diukur melalui :
 - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dapat diukur melalui :
 - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
 - c. Meningkatnya kualitas aparatur Dinas Tenaga Kerja yang dapat diukur melalui :
 - Tingkat disiplin aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
 - d. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang dapat diukur melalui :
 - Tingkat kualitas SDM Aparatur
 - e. Meningkatnya kualitas administrasi laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu yang dapat diukur melalui :
 - Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

1. Menurunnya angka pengangguran di Kota Bekasi

No	Indikator Sasaran renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target akhir RPJMD
1.	Angka Pengangguran Terbuka	%	8.75	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.2
2.	Penyediaan lapangan kerja	lowongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja

No	Indikator Sasaran renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target akhir RPJMD
1.	Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	N/A	50	54	58	60	60	60
2.	Prosentase pencari kerja yang memiliki keahlian	%	N/A	50	60	70	80	80	80

3. Meningkatkan kualitas hubungan tenaga kerja dengan pengusaha

No	Indikator Sasaran renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target akhir RPJMD
1.	Prosentase penurunan sengketa pengusaha dengan pekerja	%	102 sengketa	90	85	80	100	100	100
2.	Prosentase sengketa yang diselesaikan di tingkat mediasi	%	N/A	-	-	-	40	45	45
3.	Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang	%	N/A	80	90	95	95	100	100

telah ditetapkan									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

No	Indikator Sasaran renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target akhir RPJMD
1.	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	N/A	-	82.05	82.10	82.10	82.5	82.5
2.	Nilai evaluasi AKIP	Angka	N/A	A	A	A	A	A	A
3.	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	100	100	100	100	100

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

No	Indikator Sasaran renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target akhir RPJMD
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya kualitas aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya kualitas administrasi laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perekonomian Daerah Yang Maju dan Berdaya saing	Menurunnya Angka Pengangguran di Kota Bekasi	Angka Pengangguran Terbuka
			Penyediaan lapangan kerja
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
			Prosentase pencari kerja yang memilikikeahlian
		Meningkatkan kualitas hubungan tenaga kerja dengan pengusaha	Prosentase penurunan sengketa pengusaha dengan pekerja
			Prosentase sengketa yang diselesaikan ditingkat mediasi
			Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat
			Nilai evaluasi AKIP
			Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja Aparatur
		Meningkatnya kualitas aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur
		Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia	Tingkat kualitas SDM Aparatur
		Meningkatnya kualitas administrasi laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Memperhatikan arah kebijakan dan Strategi dari renstra Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal
2. Mengembangkan sistem informasi pasar kerja, bursa kerja dan perluasan kesempatan kerja serta Fasilitasi penempatan tenaga kerja
3. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis
4. Penguatan perlindungan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Peningkatan Kerja Sama anatar daerah, antar wilayah dan dengan Stake Holder terkait dalam rangka pengembangan wilayah
6. Peningkatan fungsi pembinaan management, dukungan administrative, pengawasan fungsional, pengembangan dan pengelolaan data informasi.

4.3.2 Kebijakan

Langkah – langkah perumusan kebijakan adalah :

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
 - Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menguji kerumuan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang di pilih dan telah mempertimbangkan faktor – faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Terampil dan Mandiri serta terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha			
MISI IV : Meningkatkan Perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing	Menurunnya angka pengangguran di Kota Bekasi	Pelatihan kopetensi calon tenaga kerja	Menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan dan perusahaan
		Penguatan kerjasama antara dunia usaha	Menjalin MUO dengan dunia usaha
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Penguatan kerjasama antara dunia usaha	Menjalin MUO dengan dunia usaha
	Meningkatkan kualitas hubungan tenaga kerja dengan pengusaha	Peningkatan program dan kegiatan pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan	Kebijakan pemerintah kota serta kepedulian dunia usaha

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-2018 dalam mewujudkan visi dan misinya, maka tindak lanjut yang akan dilakukan pada 5 (lima) tahun kedepan visi dan misi tersebut telah dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

Program-program dan kegiatan merupakan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan dengan kata lain program prioritas harus berhubungan langsung dengan kepentingan public, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi maka program-program kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang disusun dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 beserta indikator kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dijabarkan pada tabel berikut :

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	Disnaker	Kota Bekasi		
			1. Penyediaan jasa Surat menyurat	- Tercapainya surat menyurat untuk kelancaran tugas Disnaker		216	surat	17,000,000	216	surat	18,000,000	216	surat	18,000,000	500	surat	18,000,000	500	surat	18,000,000	89,000,000		
			2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya komunikasi dan penerangan Gedung Kantor		1	line telp	340,000,000	1	line telp	307,000,000	1	line telp	210,000,000	1	line telp	173,000,000	1	line telp	173,000,000	1,203,000,000		
			3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio		13	unit roda 4	30,000,000	13	unit roda 4	32,000,000												
			4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor		26	Unit roda 2	60,000,000	26	Unit roda 2	62,000,000	26	jenis org	62,000,000	26	jenis org	160,000,000	26	jenis org	160,000,000	504,000,000		
			5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- Terlaksananya penyediaan perbaikan peralatan kerja		8	jenis perlatan	30,000,000	8	jenis perlatan	31,000,000	8	jenis perlatan	31,000,000	8	jenis perlatan	31,000,000	8	jenis perlatan	31,000,000	154,000,000		

			6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis	54	jenis ATK	125,000,000	54	jenis ATK	130,000,000			145,000,000	6.255	buah	150,000,000	6.255	buah	150,000,000			700,000,000
			7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya cetakan dan penggandaan	31	jenis	125,000,000	31	jenis	130,000,000			130,000,000	1.028	buah	110,000,000	1.028	buah	110,000,000			605,000,000
			8.	Penyediaan komponen instalasi Listrik/peneranga	- Tersedianya komponen	9	jenis	8,000,000	9	jenis	10,000,000			7,500,000	317	buah	10,000,000	317	buah	10,000,000			45,500,000
			9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	160,000,000	100	%	199,000,000			175,000,000	103	unit	287,500,000	103	unit	287,500,000			1,109,000,000
			10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	jenis surat kaba	5,000,000	4	jenis surat kabar	10,000,000			25,000,000	2.400	exs majalah	25,000,000	2.400	exs majalah	25,000,000			90,000,000
			11.	Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman harian	7	jenis Box	30,000,000	7	jenis Box	44,000,000			55,000,000	445	box dus	60,000,000	445	box dus	60,000,000			249,000,000
			12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	141	org	130,000,000	141	org	132,000,000			160,000,000	288	orang	160,000,000	288	orang	160,000,000			742,000,000
			13.	Penyediaan jasa tenaga Administrasi/Teknis perkantoran	- Tersedianya pembayaran honor bagi tenaga kontrak kerja	34	org	497,084,500	34	org	895,616,000			982,000,000	29	org bln	1,049,000,000	29	org bln	1,049,000,000			4,472,700,500
			14.	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan	- Terverifikasinya Hibah dan bantuan sosial				4	rekom	20,000,000	4	rekom	20,000,000	4	rekom	10,000,000	4	rekom	10,000,000			60,000,000
			15.	Penataan Arsip	- Tersusunnya arsip-arsip												45,000,000			45,000,000			90,000,000

			16	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah	- Terlaksananya iklan surat kabar harian lokal dan iklan surat kabar							10	tayang adventori	150,000,000	10	tayang adventoria	150,000,000			300,000,000						
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100	%		100	%		100	%		100	%					Disnaker	Kota Bekasi				
			1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2	lantai	152,000,000	2	lantai	195,000,000	2	lantai	195,000,000	2	lantai	295,000,000	2	lantai	295,000,000		1,132,000,000				
			2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan belanja BBM	- Tersedianya pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional dan belanja	15	unit roda 2	193,000,000	15	unit roda 2	200,000,000			270,000,000	17	unit roda 2	12	unit roda 4	276,000,000	17	unit roda 2	12	unit roda 4	276,000,000		1,215,000,000
			3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	6	unit roda 4		6	unit roda 4																
			4.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4	jenis	10,000,000	4	jenis	4,000,000			17,500,000												
Meningkatnya kualitas aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100	%		100	%		100	%		100	%					Disnaker	Kota Bekasi				
			1.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu						60,000,000	87	stel	80,000,000	87	stel	80,000,000					220,000,000				
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia	Tingkat kualitas SDM aparatur	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		125	Stell Training	50,000,000			62,000,000			70,000,000	394	buah	75,000,000	394	buah	75,000,000		332,000,000				

			2	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan		30	org	30,000,000	32	org	32,000,000			32,000,000	25	org	35,000,000	25	org	35,000,000			164,000,000			
							100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			Disnaker	Kota Bekasi
	Meningkatnya kualitas administrasi laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																						
			1.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		45	buku	20,000,000	2	lap	21,000,000													41,000,000		
			2.	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan	- Tersusunnya laporan keuangan bulanan		36	buku	24,000,000	12	lap	25,000,000													49,000,000		
			3.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	- Terpenuhiya kegiatan laporan semesteran		48	buku	40,000,000	2	lap	42,000,000													82,000,000		
			4.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersedianya laporan renja, lakip, LPPD/LKPJ dan		5	lap	50,000,000	7	lap	70,000,000	7	lap	60,000,000	8	lap	86,500,000	8	lap	86,500,000				353,000,000		
			5.	Evaluasi hasil kinerja pelaksanaan target SPM	- Tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan target SPM		2	lap	20,000,000	2	lap	21,000,000	2	lap	21,000,000	2	lap	21,000,000	2	lap	21,000,000				104,000,000		
			5.	Penyusunan laporan keuangan	- Terpenuhiya laporan keuangan								106,000,000	45	buku	96,000,000	45	buku	96,000,000						298,000,000		

Perekonomian daerah yang maju dan berdayasaing	Menurunnya angka pengangguran di kota Bekasi	- Angka pengangguran terbuka	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian	4090 org		4090 org		4090 org		600 orang		750 orang		13,620 orang		Disnaker	Kota Bekasi				
			1 Pelatihan kerja berbasis masyarakat	- Pelatihan kerjakejuruan tata rias - Pelatihan kerja kejuruan menjahit	120	org	425,000,000	120	org	425,000,000	120	org	450,000,000	20	orang	300,000,000	560	org	1,175,000,000			
				- Pelatihan kerjakejuruan tata boga - Pelatihan kerjakejuruan kerajinan									20	orang								
			2 Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi wirausahawan	- Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi wirausahawan pemula										80	orang	200,000,000	80	org	200,000,000			
			3 Pelatihan keterampilan membuat dan menjual produk rumah tangga	- Pelatihan Handy Craft hantaran - Pelatihan Handy Craft merangkai - Pelatihan Handy Craft daur ulang										32	orang	500,000,000						
			4 Pelatihan kerja berbasis kewirausahaan	- Terselenggaranya pelatihan kerja kejuruan teknisi komputer - Terselenggaranya pelatihan kerja kejuruan servis HP	1120	org	2,800,000,000	1120	org	2,800,000,000	1120	org	2,900,000,000	40	orang	900,000,000	450	orang	950,000,000	2930	orang	7,550,000,000
													40	orang								

			3. Peningkatan pelayanan penempatan ketenagakerjaan	- Meningkatnya ruang pelayanan bidang penempatan meliputi AC, Televisi, CCTV, Surveillance Sertifikat ISO 9001 : 2015							1 ruang bidang pelayanan	150,000,000			300,000,000	1 ruang bidang pelayanan	450,000,000		
			4. Bimbingan Teknis Bursa Kerja	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan antar kerja para pengurus BKK	40 org	100,000,000	40 org	100,000,000	40 org	100,000,000	70 orang	100,000,000				150 orang	300,000,000		
			5. Pembinaan Soft Skill Kepada Pelajar SMK	- Tercapainya SDM yang dapat memenuhi standar berkualitas							5.700 siswa BKK	200,000,000	10.000 orang	450,000,000	15700 orang	650,000,000			
			6. Penyebarluasan dan Informasi Bursa Tenaga	- Tersedianya data pencari kerja harian dan berdasarkan pendidikan	2000 org	200,000,000	2000 org	200,000,000	2000 org	200,000,000	24 laporan	180,000,000		500,000,000	4060 orang	1,080,000,000			

			9. Pemeliharaan Database Ketenagakerjaan	- Tersedianya data ketenagakerjaan	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	125,000,000	1 sistem data	100,000,000			1 sistem data	325,000,000		
			10. Pembinaan, Monitoring dan Evalausi Keberadaan TKA dan PPTKIS	- Pembinaan perusahaan pengerah Tenaga Kerja (PPTKIS) - Pembinaan perusahaan pengguna TKA (PPTKA) - Laporan hasil monitoring dan evaluasi							30 prsh	90,000,000	120 TKA	90,000,000	120 TKA	180,000,000		
		- Prosentase pencari kerja yang memiliki keahlian	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	- Meningkatkan jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian	4090 org		4090 org	4090 org	600 orang			750 orang		13,620 orang			Disnaker	Kota Bekasi
			1. Pelatihan kerja berbasis kompetensi	- Pelatihan kerja kejuruan operator - Pelatihan kerja kejuruan operator komputer	1000 org	3,750,000,000	1000 org	3,750,000,000	1000 org	3,750,000,000	20 orang	560,000,000	50 orang	800,000,000	2150 orang	8,860,000,000		
				- Pelatihan kerja kejuruan montir mobil - Pelatihan kerja kejuruan instalasi kelistrikan - Pelatihan kerja kejuruan Las CO2					20 orang									
			2. Penyelenggaraan pola magang kerja di perusahaan	- Terlaksananya uji latih kerja atau pemagangan di perusahaan	100 org	500,000,000	100 org	550,000,000	100 org	600,000,000	80 orang	540,000,000	80 orang	450,000,000	360 orang	2,140,000,000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Penetapan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Ketenagakerjaan.

Prestasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018.

Kebijakan Umum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ada 4 (empat) Misi yaitu antara lain :

1. Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Berkualitas, Profesional dan Mandiri;
2. Mewujudkan optimalisasi terbukanya lapangan kerja bagi Masyarakat;
3. Mewujudkan Hubungan Yang Harmonis antara Perusahaan pekerjaan dan pemerintah;
4. Mewujudkan Manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien dan terarah.

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

1. Angka Pengangguran Terbuka

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian	orang		4.090	4.090	4.090	600	750	13.620

2. Penyediaan lapangan kerja

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1..	Meningkatnya Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

3. Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan	Orang		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

4. Prosentase pencari kerja yang memiliki keahlian

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya Pencari kerja yang memiliki keahlian	Orang		4.090	4.090	4.090	600	750	13.620

5. Prosentase Penurunan sengketa pengusaha dengan pekerja

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja	Orang	102 sengketa	90	85	80	100	100	100
2.	Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja	%	25	25	30	40	45	47	47

6. Prosentase sengketa yang diselesaikan di tingkat mediasi

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja	%		-	-	-	40	45	45

7. Prosentase Pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan	%	80	80	90	95	95	100	100

8. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	N/A	N/A	82.05	82.10	82.10	82.5	82.5
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	A	A	A	A	A	A	A
3.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100

9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya kualitas aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya kualitas administrasi laporan keuangan dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi selama periode 2013-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bekasi 2013-2018.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang merupakan rencana tahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi selama periode lima tahun, 2013-2018 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

**H. MOCHAMAD KOSIM, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590218 198603 1 006